



Ratusan Sekolah di DIY Kekurangan Siswa

GUNUNGKIDUL—Ratusan sekolah di DIY terutama di wilayah pelosok di Gunungkidul dan Kulonprogo, kekurangan siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah dasar (SD).

David Kurniawan, Andreas Yuda Pramono,
& Triyo Handoko
redaksi@harianjogja.com

Berdasarkan hasil PPDB, ratusan sekolah di Gunungkidul kekurangan murid. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul, Hary Sulaksana, mengatakan total ada 468 SD yang mengikuti PPDB Tahun Ajaran 2023-2023. Pendaftaran berlangsung 12-14 Juni dan hasilnya diumumkan pada 16 Juni 2023. "Besok [hari ini]

mulai daftar ulang siswa yang diterima di sekolah tujuan," kata Hary, Minggu (18/6).

Ia menjelaskan berdasarkan pemantauan hasil PPDB, banyak sekolah kekurangan murid. Sesuai dengan peraturan, setiap rombongan belajar harus diisi paling sedikit 28 anak.

► Halaman 10

- SD yang jumlah kuotanya belum terpenuhi masih diperbolehkan menerima siswa baru.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulonprogo memprediksi sejumlah sekolah yang kekurangan siswa.

Ratusan Sekolah...

Meski demikian, kata Hary, tidak semua sekolah dapat memenuhinya. Pasalnya, dari 468 SD, yang mampu memenuhi kapasitas rombongan belajar hanya 22 sekolah. "Sisanya, 446 sekolah tidak memenuhi kuotanya. Kekurangannya bervariasi dan yang jelas di tiap sekolah kurang dari 28 anak yang diterima," ungkapnya.

SD yang belum memenuhi kuota, masih diperbolehkan menerima siswa baru. Teknisnya, calon siswa langsung mendatangi sekolah yang dituju. "Jadi sistemnya tidak online lagi, tetapi harus datang ke sekolah yang dituju," katanya.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Bidang SD Disdik Gunungkidul, Asbani, menambahkan jumlah SD yang kekurangan murid sudah diprediksi sejak awal. Hal ini terlihat dari jumlah kursi yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan calon murid.

Sebagai gambaran, daya tampung siswa SD di Gunungkidul sebanyak 14.028 bangku, sedangkan jumlah lulusan TK yang masuk ke SD hanya 8.000-9.000 anak. "Jadi kursinya lebih banyak sehingga ada sekolah yang tidak bisa memenuhi kuota," katanya.

Tiga Jalur

Kondisi yang sama juga terjadi di Kulonprogo. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulonprogo, Arif Prastowo, memprediksi kuota pelajar di beberapa SMP di Kapanewon Girimulyo, Samigaluh, dan Kokap tidak akan terpenuhi karena lulusan SD di

tiga wilayah tersebut hanya sedikit. "Apabila terdapat kekurangan siswa baru di satuan pendidikan, tidak serta merta sekolah akan *regrouping* [penggabungan sekolah]. Karena diperlukan kajian yang komprehensif dalam rencana *regrouping*," ucapnya, Minggu.

Berbeda dengan jenjang SMP, pendaftaran jenjang SD dilakukan calon murid dengan datang langsung ke sekolah yang dituju. Arif mengatakan dua jalur PPDB di Kabupaten Kulonprogo telah selesai. Dengan begitu tersisa tiga jalur lagi, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua yang akan dibuka pada Senin (19/6). Kuota jalur afirmasi dan bina lingkungan terpenuhi di hampir semua sekolah baik SD maupun SMP di Kulonprogo. "Kalau yang bina lingkungan kan memang prioritas," kata Arif.

Begitupun juga dengan jalur afirmasi yang menurut Arif sudah jelas terpenuhi dari sisi kuota. "Afirmasi adalah jalur yang banyak digunakan calon siswa dari keluarga yang masuk di data kemiskinan terpadu. Mereka bisa masuk sepanjang kuota jalur afirmasi masih mencukupi," katanya.

Jalur zonasi PPDB tingkat SD paling sedikit 80%, sedangkan SMP paling sedikit 65%. Total untuk jenjang SD, terdapat 225 sekolah dengan jumlah kursi tersedia sekitar 6.000 pelajar.

Dugaan Pelanggaran

Sementara itu, Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja menemukan dugaan pelanggaran pada PPDB

jenjang SMP. Dugaan pelanggaran PPDB tersebut ada dalam seleksi jalur zonasi wilayah. Pendaftar menumpang alamat dan kartu keluarga (KK) kerabat yang dekat dengan SMP yang dijadikan sasaran pendaftaran.

Kasus tersebut ditemukan saat Forpi Jogja mengecek verifikasi PPDB di dua SMP negeri di Jogja. Dalam pemeriksaan Forpi Jogja terdapat beberapa dokumen pendaftaran calon siswa yang dalam kartu keluarganya berstatus keluarga lain.

"Menariknya, fenomena status 'famili lain' sebaran domisilinya dekat dengan sekolah-sekolah unggulan. Sama dengan PPDB tahun sebelumnya. Meskipun tanggal diterbitkan KK tersebut sudah satu tahun," kata anggota Forpi Jogja, Baharudin Kamba, Minggu.

Selain status dalam keluarga yang tercatat sebagai famili lain, Kamba juga menemukan dugaan pelanggaran lain. "Contoh lainnya ada seorang perempuan dengan status kawin tercatat. Statusnya sebagai kepala keluarga. Namun, dalam KK tersebut tidak terdapat suaminya. Hanya ada perempuan tersebut dan dua anaknya. Hal ini kami temukan di salah satu SMP negeri di Jogja," ujarnya.

Kamba menilai tindakan mencatatkan anak ke keluarga lain untuk mengikuti PPDB sangat merugikan calon siswa yang benar-benar warga setempat. "Calon siswa harus tersingkir karena kalah dekat dengan calon siswa lain yang berstatus famili lain," ujar dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005